



JURNAL RONA TEKNIK PERTANIAN
ISSN : 2085-2614; e-ISSN 2528 2654
JOURNAL HOMEPAGE : <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/RTP>



Perlindungan Lahan Sawah Dalam Pencapaian Ketahanan Pangan Nasional

Sri Mulyani^{1)*}, Aqil Teguh Fathani²⁾, Eko Priyo Purnomo²⁾

¹Universitas Tidar, Jalan Kapten Suparman Kota Magelang, Jawa Tengah 56116

²Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jalan Brawijaya Kasihan, Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55183, Indonesia

*Email: srimumlyani@untidar.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini melihat ketahanan pangan berkelanjutan yang merupakan suatu kewajiban dan harus dilakukan untuk menjaga ketersediaan pangan khususnya padi. Pada saat ini di Sumatera Barat sedang maraknya terjadi alih fungsi lahan lawah. Alih fungsi lahan sawah ini disebabkan oleh pembangunan infrastruktur, perumahan, jalan, jalan tol, sarana umum dan fasilitas lainnya. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan rasionalistik. Hasil penelitian menyebutkan dengan adanya alih fungsi lahan sawah menyebabkan luas panen terhadap padi dan jumlah produksi padi terus berkurang. Pada tahun 2018 terjadi pengurangan luas panen dan produksi padi yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya (2017) yaitu sebesar 220 ribu ha luas panen padi dan 1.4 juta ton produksi padi. Hal ini dinilai sangat berbahaya bagi ketahanan pangan yang berkelanjutan karena jumlah penduduk terus bertambah dan juga kebutuhan terhadap pangan juga semakin meningkat sedangkan jumlah produksi justru terus berkurang. Oleh karena itu perlu adanya peran dari semua unsur untuk mengkontrol dan mengendalikan lahan sawah serta pemerintah dengan segera membuat regulasi Peraturan Daerah untuk mengatur lahan sawah agar tidak terjadi alih fungsi lahan sawah secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Ketahanan Pangan, Lahan Sawah, Sumatera Barat

Protection of Rice Fields in Achieving National Food Security

Sri Mulyani^{1)*}, Aqil Teguh Fathani²⁾, Eko Priyo Purnomo³⁾

¹Universitas Tidar, Jalan Kapten Suparman Kota Magelang, Jawa Tengah 56116

^{2,3}Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jalan Brawijaya, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183, Indonesia

*Email: srimumlyani@untidar.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to see sustainable food security which is an obligation and must be done to maintain food availability, especially rice. The function of paddy fields is caused by the development of infrastructure, housing, roads, toll roads, public means,

and other facilities. The methods in this study used qualitative methods with a rationalistic approach. The results of the study mentioned that the Land of rice field function caused the harvest area to rice and the amount of rice production continued to decrease. In 2018 there was a reduction in the vast harvest and rice production which was significantly from the previous year which amounted to 220 thousand hectares of rice harvest and 1.4 million tonnes of rice production. This is very dangerous for sustainable food security because the population continues to grow and also the need for food is also increasing while the number of production is steadily decreasing. Therefore, it is necessary to have the role of all elements to control and control the rice fields and government by immediately make the regulation of local regulations to regulate the field of rice fields to prevent the functioning of the rice field sustainability.

Keywords: Food Security, Paddy Fields, West Sumatera, Protections

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan nasional merupakan upaya yang harus dilakukan secara serentak oleh pemerintah, petani, komunitas, petani, masyarakat dan pemilik modal dalam penguatan kebutuhan pangan nasional (Aisyah et al., 2020). Ketahanan pangan global menjadi isu yang besar pada saat ini dan menjadi perhatian besar bagi beberapa negara karena menyangkut kelangsungan hidup manusia dan lingkungan (Chawarika, 2016). Peningkatan atas kebutuhan pangan dan menurunnya pasokan pangan dunia menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan dan stabilitas ekonomi nasional (Zou & Guo, 2015). Ketahanan pangan menurut *World Health Organization* (WHO) memiliki tiga aspek yaitu ketersediaan pangan, pemanfaatan pangan dan aksesibilitas pangan. Ketersediaan pangan merupakan kemampuan untuk memiliki pangan yang cukup, pemanfaatan pangan yaitu kemampuan untuk memanfaatkan bahan pangan yang berkualitas dan aksesibilitas pangan yaitu kemampuan untuk memperoleh pangan (Hakim, 2014).

Pangan dapat diartikan secara umum dan secara khusus, secara umum pangan merupakan produksi pertanian pada subsektor tanaman pangan, secara khusus pangan merupakan tanaman padi-padian termasuk beras, jagung, gandum dan sorgum (Hui, 2013). Secara umum analisis ketahanan pangan dapat dilakukan pada tingkat global, nasional, regional, rumah tangga serta individu. Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang dimaksud dengan ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan individu yang dapat dilihat dari tersedianya pangan yang cukup baik itu jumlah ataupun gizi dan kualitas, merata, terjangkau dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Ketahanan pangan pada tingkat nasional sejatinya sangat berhubungan dengan kepentingan suatu negara karena mencakup berbagai aspek seperti perdagangan antar negara dan industri nasional (Wu et al., 2016).

Ketahanan pangan pada suatu daerah dapat dinilai dengan rasio ketersediaan pasokan dan jumlah konsumsi, di Indonesia sendiri pada saat ini ketahanan pangan menjadi prioritas dalam pembangunan jangka pendek atau jangka panjang. Fokus ketahanan pangan berpegang pada pendekatan yang mengutamakan keseimbangan antara jumlah penduduk pada suatu daerah dengan jumlah ketersediaan pangan, tingkat ketersediaan pangan tidak boleh rendah dari tingkat pertumbuhan jumlah penduduk agar keseimbangan dapat tercapai (Burchi & De Muro, 2016). Menurut data Atlas Tata Ruang Pertanian (2018) Indonesia memiliki luas daratan 188 juta ha, 148 juta ha (78%) lahan

kering yang tidak keseluruhannya bisa untuk pertanian dan 40 juta ha (22%) lahan basah. Pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi yang tinggi menjadi penyebab utama dari pengalihan lahan dari lahan pertanian kepada non-pertanian dan sangat berpengaruh dalam kinerja produksi pangan (Gunardi et al., 2018). Selain itu perkembangan dan pertumbuhan sektor non-pertanian juga mengakibatkan perpindahan para pekerja dari pertanian kepada pekerjaan non-pertanian, hal ini sangat membahayakan ketahanan pangan suatu wilayah (Jaya, 2018).

Menurut Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) lahan pertanian Indonesia setiap tahun terus berkurang sekitar 130 ribu ha (Bayu, 2020). Menurut Badan Pusat Statistik luas lahan baku sawah tahun 2019 tersisa 7,4 juta ha, turun dibanding tahun 2018 yaitu 7.75 juta ha. Sementara luas lahan sawah di wilayah Sumatera bagian tengah menurut Kementerian Pertanian yaitu Sumatera Barat sebesar 194.282 ha, Riau 62.689 ha dan Jambi 68.349 ha. Luas lahan yang menyentuh 325.320 ha ini setiap tahunnya terus berkurang dikarenakan berbagai faktor yaitu, perpindahan fungsi lahan pertanian ke non-pertanian, lahan yang sudah tidak produktif, pengalihan dari lahan sawah ke perkebunan, pembangunan infrastruktur dan bencana alam. Oleh karena itu pada penelitian ini mengkaji tentang bagaimana perlindungan lahan sawah untuk mempertahankan ketahanan pangan yang berkelanjutan, serta bagaimana ketersediaan beras dan kemampuan dalam produksi dan konsumsi pada wilayah provinsi Sumatera Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat perlindungan lahan sawah di Provinsi Sumatera Barat dalam Pencapaian Ketahanan Pangan Nasional.

Literatur Review

Menurut Badan Ketahanan Pangan Indonesia dalam mempertahankan ketahanan pangan di Indonesia perlu adanya sistem informasi untuk pemetaan daerah potensi dan rawan pangan. Secara sederhana kondisi ketahanan pangan daerah sangat ditentukan oleh jumlah produksi, konsumsi dan distribusi pangan. Dari aspek kerawanan pangan terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan dan pendapatan, kesehatan dan gizi, serta aspek kerentanan pangan yang disebabkan oleh keadaan lingkungan dan kejadian bencana alam.

Perlunya konservasi lahan agar lahan pertanian tidak berkurang menjadi salah satu cara efektif dilakukan agar tidak terjadi pengurangan lahan sawah setiap tahunnya. Produksi padi telah berlangsung sejak ribuan tahun lalu dan dianggap sebagai salah satu sistem pertanian yang berkelanjutan dan paling produktif di dunia (Fairhurst & Dobermann, 2002). Produksi komoditas utama seperti beras dan jagung sangat tergantung pada luas panen dan produktifitas (Van Oort et al., 2015). Lahan yang tetap merupakan faktor utama dalam meningkatkan produksi pertanian, khususnya beras jagung dan didukung dengan pengairan yang cukup (Ye et al., 2014). Oleh karenanya sangat diperlukan sarana pendukung dalam meningkatkan produktifitas pertanian di Indonesia, salah satu yang paling penting adalah area irigasi, dengan irigasi yang cukup akan meningkatkan produktifitas padi di Indonesia (Panuju et al., 2013).

Dalam penerapan teknologi dibidang pertanian, pemetaan kondisi pangan salah satu cara yang tepat untuk dilakukan yaitu dengan Sistem Informasi Geografi (SIG). Sejalan dengan pendapat tersebut Sugiantoro., et al (2015) menyebutkan berkat adanya SIG lahan pertanian di Kabupaten Sigi mudah diidentifikasi, ada 2 lahan prioritas yaitu di kecamatan Kulawi dengan luas 286,87 ha dan di Kecamatan Kulawi selatan dengan luas 1.008,68 ha. Selanjutnya menurut (Ambarita, 2017) SIG memberikan informasi dan lokasi potensi pangan yang ada di Halmahera Barat dan sangat membantu pemerintah dalam

mempromosikan pangan kepada pengunjung dan investor.

Menurut (Prasada & Rosa, 2018) meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan sawah menjadi lahan non pertanian. Alih fungsi lahan memberikan dampak negatif terhadap ketersediaan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Alih fungsi lahan sawah menyebabkan hilangnya produksi beras sebanyak 18.359 ton selama periode 2006-2015. Salah satu cara alternatif guna mempertahankan pangan Indonesia adalah melalui reformasi agraria. Menurut (Waryanta, 2016) reforma agraria merupakan program pemerintah untuk mewujudkan kemandirian dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Akan tetapi dalam implementasi reforma agraria belum mampu mengatasi permasalahan pangan perlu adanya penekanan dalam budidaya tanaman dan peternakan agar kebutuhan masyarakat terpenuhi secara maksimal.

Pada saat ini daerah Tangerang Selatan telah memiliki strategi dalam ketahanan pangan lokal, (Rimadianti & Daryanto, 2016) mendeskripsikan dalam ketahanan pangan lokal perlu adanya komitmen dari kepala daerah. Analisis SWOT menunjukkan pemerintah kota Tangerang Selatan perlu meningkatkan ketersediaan pangan karena harga pangan sangat fluktuatif dan perlu meningkatkan kerjasama *triple helix* antara tim ahli, industri dan pemerintah. Menurut (Achmad et al., 2019) salah satu penentu ketahanan nasional adalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan rumah tangga ternak sapi di Yogyakarta masuk dalam kategori kurang dan rawan pangan memerlukan perhatian lebih dari pemerintah demi perbaikan konsumsi masyarakat. Menurut (Armawi, 2016) menyebutkan pertanian Indonesia saat ini belum mampu untuk mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri dan sangat tergantung pada pangan impor, hal ini dinilai sangat miris melihat kerawanan pangan Indonesia dan bisa mengancam ketahanan nasional. Dalam skala yang lebih kecil seperti di Kecamatan Ceper, kabupaten Klaten setiap tahunnya terjadi alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian seluas 40-50 hektar (Fattah & Purnomo, 2018).

Beberapa daerah lain di Indonesia juga mengalami kesulitan dalam mempertahankan ketahanan pangan. Menurut (Janti et al., 2016) menyebutkan pemerintah kabupaten Bantul belum serius dalam perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Hal ini disebabkan pertama, perencanaan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan baru sampai pada tahap penyusunan, kedua kurangnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan lahan pertanian dan ketiga perlu dilakukan diversifikasi pangan lokal melalui budidaya dengan memanfaatkan lahan pekarangan. Selanjutnya (Sudarwani & Ekaputra, 2014) menyebutkan perlu adanya perlindungan lahan pertanian karena setiap tahunnya terjadi alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian lebih kurang 2% per tahun di kecamatan Gunungpati Semarang, efek dari alih fungsi lahan adalah berkurangnya ketersediaan pangan. Oleh karena itu perlu adanya konservasi lahan pertanian dengan tujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan meminimalisir terjadinya bencana. Menurut Wardani., et al (2019) membandingkan ketahanan beras di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa dengan hasil ketahanan beras di Jawa lebih rendah karena pertumbuhan ketersediaan beras perkapita dan penurunan konsumsi beras perkapita lebih rendah dibanding luar Pulau Jawa.

Pemerintah juga menekankan kepada masyarakat untuk memanfaatkan halaman rumah untuk mendukung ketahanan pangan, menurut Kastanja., et al (2019) Desa Kali Upa merupakan desa yang berpotensi untuk mengembangkan lahan pertanian di pekarangan. Masyarakat sudah didedikasi untuk optimalisasi pemanfaatan pekarangan dengan tanaman pertanian untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan

meningkatkan pendapatan masyarakat. Sama halnya dengan kabupaten Kulon Progo, menurut (Aninda & Rijanta, 2017) ketahanan pangan dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan sumberdaya lokal secara maksimal. Ketahanan pangan di desa Bendungan Kulon Progo saat ini mencukupi untuk di konsumsi dan dijual di pasaran karena setiap tahunnya produksi padi terus meningkat.

Perlu adanya penguatan ketahanan pangan oleh instansi atau lembaga pemerintahan, (Arifin, 2019) di Parepare sejak dahulu telah ada lembaga ketahanan pangan tradisional sebagai bentuk adaptasi terhadap kemiskinan nelayan, akan tetapi karena pertumbuhan penduduk dan desakan ekonomi semakin meningkat dibutuhkan manajemen ketahanan pangan yang lebih kompleks dan didukung sistem organisasi modern demi memperkuat ketahanan pangan lokal di Parepare. Berbeda dengan Sumatera Utara penelitian dari (Sinaga et al., 2014) menyebutkan ketersediaan pangan (jagung, ubi kayu, dan daging sapi) mengalami kenaikan, sedangkan untuk ketersediaan pangan (beras dan telur ayam) mengalami penurunan. Hasil dari analisis *forecasting* secara keseluruhan menunjukkan ketersediaan pangan di Sumatera Utara pada tahun 2015 mencukupi untuk di konsumsi.

Kerangka Pikir

Konsep ketahanan pangan dapat diterapkan untuk melihat keadaan pangan pada tingkat global, nasional, daerah, lokal, rumah tangga dan individu (Prasada & Rosa, 2018). Untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan perlu memperhatikan tiga indikator (Aisyah et al., 2020) yaitu pertama, prinsip ketahanan pangan harus didasarkan bahwa pangan merupakan hak asasi dan kebutuhan dasar bagi manusia, oleh karena itu tujuannya adalah untuk melindungi, mempertahankan dan menjamin semua orang untuk memperoleh pangan secara memadai. Kedua, ketahanan pangan harus diperlakukan sebagai sistem hirarki dimulai dari tingkat global sampai tingkat rumah tangga/individu. Selain itu ketahanan pangan juga perlu memperhatikan beberapa elemen yaitu sistem monitoring dan kewaspadaan dini, sistem keamanan sosial dan sistem jaring pengaman sosial. Ketiga, komponen pendukung dari ketahanan pangan yang berkelanjutan yaitu pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.



Sumber: adopsi dari (Aisyah et al., 2020) dan (Prasada & Rosa, 2018)

Gambar 1. Kerangka Pikir

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini dilakukan dengan paradigma kualitatif dengan pendekatan rasionalistik (Muhadjir, 2000). Pendekatan penelitian rasionalistik kualitatif dinilai sesuai dengan penelitian yang dilakukan yaitu mengungkap dan memahami terkait perlindungan lahan sawah yang setiap tahun terus berkurang, mendeskripsikan bagaimana langkah strategis yang digunakan untuk melindungi lahan persawahan untuk menciptakan ketahanan pangan nasional, serta bagaimana ketersediaan beras dan kemampuan petani dalam produksi dan jumlah konsumsi masyarakat (Haryanto, 2018).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari beberapa instansi seperti Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian, Bulog, jurnal, buku, berita dan media lainnya sebagai sumber yang relevan dalam penelitian. Setelah data didapatkan dan disaring sesuai kebutuhan dalam penelitian, kemudian data ditelaah, dipilih dan dirangkai menjadi satu kesatuan yang berkesinambungan sesuai dengan penelitian.

Penelitian ini perlu dilakukan karena setiap tahunnya lahan sawah yang ada di Sumatera Barat terus berkurang setiap tahunnya oleh beberapa faktor seperti pembangunan infrastruktur, pelebaran jalan, jalan tol, perumahan, sarana umum dan alih fungsi lahan sawah kepada perkebunan. Oleh karena itu perlu ada pembahasan yang serius mengenai perlindungan lahan sawah, regulasi yang melindungi lahan sawah dan bantuan kepada petani sawah agar tetap terus mempertahankan lahan sawah mereka. Hasil penelitian ini juga memberikan saran kepada Dinas Pertanian atau Dinas Pangan untuk selalu memperhatikan lahan sawah dan juga memperhatikan petani agar keberlangsungan produksi terus berlanjut mengingat kebutuhan masyarakat setiap tahun semakin meningkat.

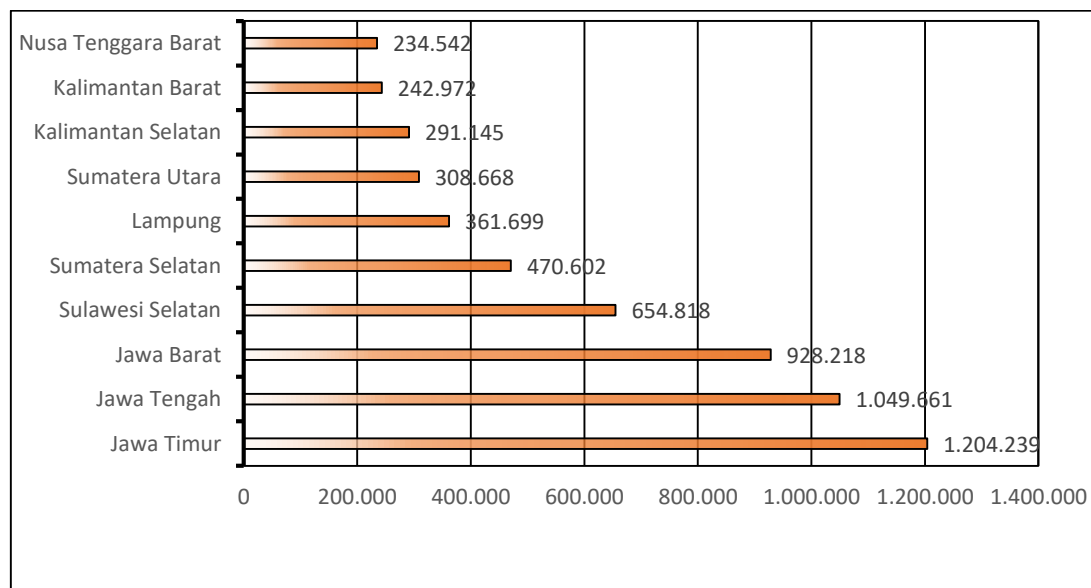
PEMBAHASAN

Pada era modern saat ini semakin banyaknya pengalihan lahan ke berbagai sektor, seperti pengalihan lahan untuk pembangunan rumah, pembangunan jalan, taman, area bermain dan pembangunan lainnya. Dengan semakin berkembangnya sektor non-pertanian mengakibatkan terjadinya pengalihan lahan besar-besaran dari lahan pertanian kepada lahan non-pertanian. Pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong permintaan untuk tanah semakin tinggi setiap tahunnya yang digunakan untuk pemukiman penduduk. Implikasi dari hal ini adalah pembukaan lahan untuk digunakan sebagai infrastruktur bangunan yang menagrah kepada konservasi lahan pertanian ke lahan non-pertanian, secara langsung akan mengakibatkan pengurangan luas lahan pertanian. Fenomena konservasi lahan akan terus terjadi sebagai akibat dari meningkatnya kebutuhan kehidupan manusia terhadap ruang untuk perumahan pembangunan serta menjadikan lahan sebagai jalan alternatif untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang praktis (Karini, 2013). Konservasi lahan sendiri mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan lahan serta merusak lahan karena lahan yang hanya memiliki kapasitas untuk pertanian digunakan untuk pembangunan dan infrastruktur lainnya.

Penurunan luas lahan pertanian kan mengakibatkan penurunan jumlah produksi pertanian, dengan ini semakin bertambahnya jumlah penduduk akan semakin meningkatkan jumlah permintaan pangan dan secara langsung akan menurunkan produksi pangan karena lahan pertanian semakin berkurang (Budhi et al., 2017).

Selanjutnya meningkatnya pengalihan lahan dari pertanian ke non-pertanian menyebabkan produksi beras terus menurun dan lebih parah akan mengancam ketahanan pangan nasional (Nuryartono et al., 2017). Produksi beras di Indonesia hanya tergantung pada area sawah yang memiliki aliran irigasi sehingga memiliki produktifitas yang lebih dari satu kali dalam setahun, sedangkan lahan sawah yang non irigasi hanya dapat melakukan produktifitas apabila terjadi curah hujan yang cukup.

Untuk mencapai keinginan dalam ketahanan pangan khususnya beras, beras yang dihasilkan dari lahan sawah seharusnya mempunyai dukungan yang besar dari berbagai sektor dengan tujuan mencukupi penyediaan pangan penduduk sehingga mendapatkan hasil produksi yang mencukupi kebutuhan pangan. Alih fungsi lahan saat ini telah terjadi sebagian besar di pulau Jawa, peningkatan pembangunan infrastruktur seperti jalan, bandara, perumahan, hotel dan infrastruktur lainnya menjadikan area persawahan di pulau Jawa semakin berkurang setiap tahunnya. Padahal sejatinya pemerintah melalui program Nawacita telah mengeluarkan program untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan mengaktifkan sektor-sektor strategis ekonomi terutama dalam pertanian serta mendorong upaya untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Saat ini hal yang harus dilakukan untuk mendorong terlaksananya rencana strategis tersebut adalah mendorong masyarakat, petani, pihak swasta dan komunitas-komunitas untuk berkolaborasi dalam mewujudkan pelaksanaan rencana strategis yang telah dirancang oleh pemerintah. Kolaborasi antar keseluruhan sektor tersebut akan menjadikan awal yang baik dalam mempertahankan ketahanan lahan pertanian dan pangan di tingkat daerah maupun nasional.

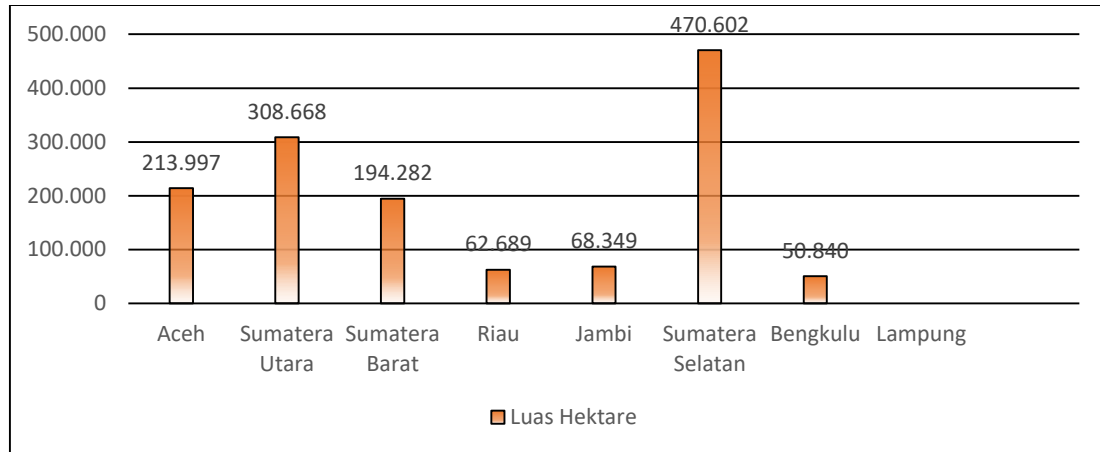


Sumber: Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun, Desember 2019

Gambar 2. Luas Lahan Baku Sawah di Indonesia

Gambar 2. menerangkan luas lahan baku sawah di Indonesia masih didominasi oleh beberapa provinsi di pulau Jawa. Salah satu program pemerintah saat ini yaitu memfokuskan lahan sawah di daerah luar pulau Jawa untuk menghasilkan padi yang cukup bagi ketahanan pangan, mengingat area pulau Jawa yang semakin padat dan area pertanian semakin berkurang karena pengalihan lahan pertanian (Kementerian Pertanian, 2019). Salah satu fokus pemerintah yaitu memfokuskan area pertanian pada pulau

Sumatera. Area pulau Sumatera memang memiliki tanah yang luas, akan tetapi tidak semua area bisa digunakan untuk lahan sawah dikarenakan beberapa faktor seperti, keunggulan komoditi lain selain padi, nilai jual yang rendah dan struktur tanah serta area perbukitan yang terbentang dari Provinsi Aceh hingga Provinsi Lampung.



Sumber : Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Desember 2019

Gambar 3. Luas Lahan Baku Sawah Pulau Sumatera

Jumlah keseluruhan luas lahan baku sawah pulau Sumatera (Gambar 3) lebih kurang sama dengan luas lahan baku sawah pada provinsi Jawa Tengah, yang artinya satu pulau Sumatera sama dengan luas lahan baku sawah yang ada di Jawa Tengah. Oleh karena itu pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah memulai langkah untuk memfokuskan lahan sawah yang ada di luar pulau Jawa serta memanfaatkan lahan yang belum digunakan untuk pertanian agar bisa memenuhi kebutuhan penduduk yang setiap tahun semakin meningkat.

Alih Fungsi Lahan Sawah

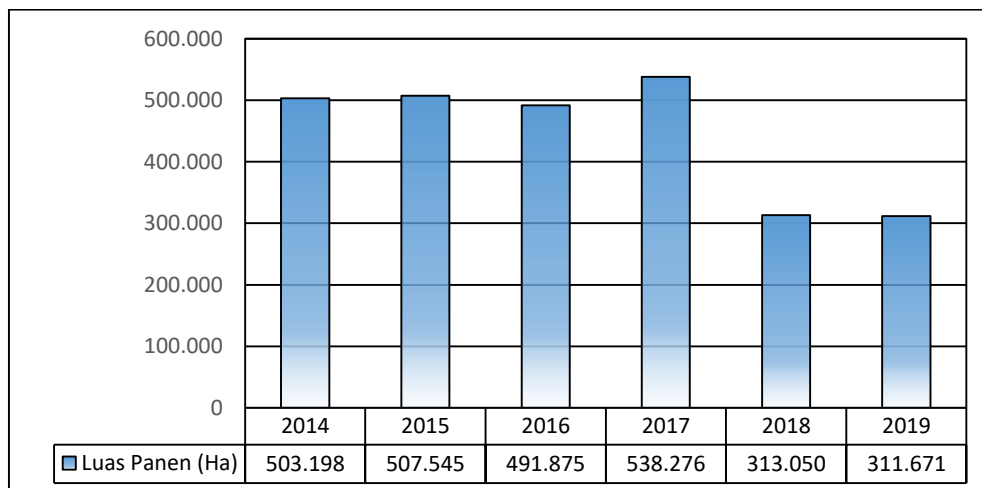
Provinsi Sumatera Barat merupakan provinsi yang memiliki luas lahan baku sawah terluas di bagian wilayah Sumatera Tengah dengan luas 194.282 ha. Luas ini setiap tahun terus berkurang karena beberapa faktor perekonomian yang mengalami perubahan dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, peralihan dari pertanian sawah ke perkebunan sawit, dan daya jual padi yang rendah. Selain itu adanya kegiatan pembangunan infrastruktur dan jalan semakin membuat lahan sawah semakin sempit, penyempitan lahan yang terjadi terus menerus dikhawatirkan berdampak pada produksi beras hingga terjadi kerawanan ketahanan pangan.

Menurut Dinas Pertanian Provinsi Sumbar, lahan pertanian setiap tahunnya terus berkurang sekitar 14-16% dan berada diangka sekitar 29.100-35.000 ha setiap tahunnya. Pengurangan lahan sawah ini dikarenakan beberapa faktor, seperti penyusutan aliran irigasi sawah, pengalihan fungsi lahan ke kebun sawit dan perkebunan karet diberbagai daerah yaitu Pasaman Barat, Indera Pura (Pesisir Selatan) dan Dharmasraya, pembangunan jalan tol, jalan penghubung antar provinsi dan pembangunan perumahan, lahan yang tidak produktif di kab. Solok dan kab. Solok Selatan dan faktor sumber daya manusia yang beralih profesi ke non-pertanian. Sementara di Kota Padang sebagai ibukota provinsi saat ini sedang maraknya pembangunan Infrastruktur jalan dan perumahan. Pembangunan perumahan di Padang terjadi di tiga kecamatan Nanggalo, Kuranji, dan Koto Tangah. Pembangunan perumahan ini membuat lahan pertanian di

Kota Padang menyusut sekitar 25% dari 8.900 ha menjadi 5700 ha (BPS, 2019). Pembangunan ini akan terus berlanjut setiap tahunnya mengingat terjadinya pertumbuhan penduduk dan diikuti dengan kebutuhan perumahan yang semakin meningkat, lebih lanjut juga terjadi peningkatan terhadap pembangunan infrastruktur lainnya seperti pasar, pertokoan, industri dan sarana pendukung lainnya.

Daerah perkotaan di Sumatera Barat keseluruhannya mengalami penyempitan lahan pertanian dan pengalihan lahan pertanian ke non-pertanian, ini didasarkan karena daerah perkotaan sangat bagus digunakan sebagai kegiatan ekonomi non-pertanian. Padahal hal tersebut sangat berbahaya bagi ketahanan pangan daerah, tetapi tetap saja pembangunan infrastruktur tetap berlangsung di kota-kota di Sumatera Barat. Sedangkan untuk daerah kabupaten tidak terjadi penambahan lahan pertanian sawah, melainkan terjadi alih fungsi lahan pertanian sawah kepada lahan perkebunan dikarenakan hasil perkebunan dinilai lebih menguntungkan dari pada sawah.

Penurunan jumlah produksi padi tentu saja dipengaruhi oleh luas lahan yang tersedia. Dalam lima tahun terakhir (2014-2019) luas panen padi yang ada di Provinsi Sumatera Barat tidak mengalami kenaikan, melainkan mengalami penurunan drastis. Hal ini bisa dilihat dalam Gambar 4.



Sumber : Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2020

Gambar 4. Luas Panen di Provinsi Sumatera Barat

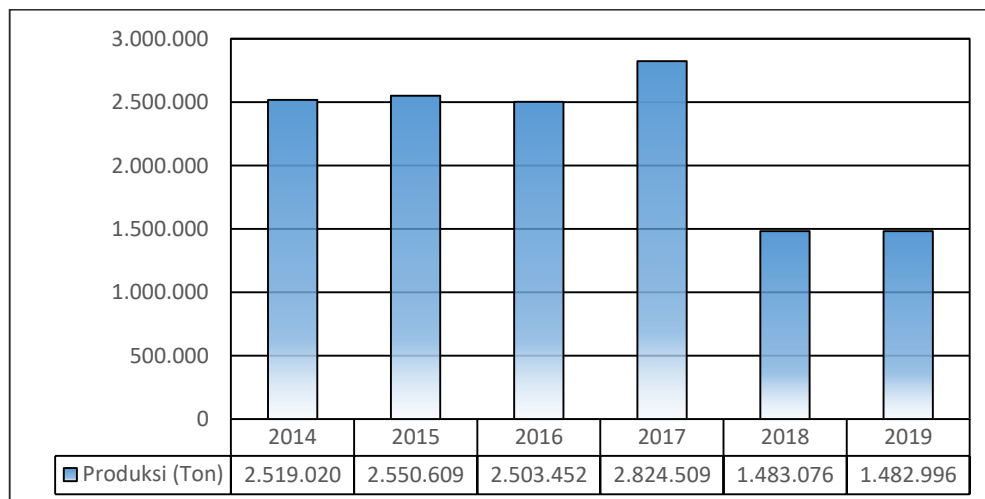
Luas lahan panen yang ada di Sumatera Barat setiap tahunnya tidak mengalami kenaikan, melainkan mengalami penurunan, penurunan drastis terjadi pada tahun 2017 ke tahun 2018. Data yang diinput dari Badan Pusat Statistik tahun 2019, luas panen pada tahun 2017 yaitu sebesar 538.276 ha turun drastis menjadi 313.050 ha pada tahun 2018. Penurunan luas panen ini terjadi karena dipicu oleh beberapa faktor seperti alih fungsi lahan, pembangunan jalan, meningkatnya pembukaan kawasan pemukiman baru, pergudangan, pertokoan, dan kawasan industri sehingga praktek alih fungsi lahan persawahan semakin meningkat dan tidak bisa dihindarkan.

Terjadinya perpindahan struktur perekonomian yang mengarah pada meningkatnya sektor industri dan jasa semakin mengubah besaran penggunaan lahan sawah. Akibat dari ini terjadi relokasi sumberdaya lahan antar sektor, realokasi yang di prioritaskan kepada kegiatan industri sebagai kegiatan utama dapat menarik perkembangan kegiatan lainnya yaitu pemukiman, perdagangan, dan sarana-prasaran pendukung lainnya sehingga pengalihan lahan tidak dapat dihindarkan. Untuk menjamin kemandirian pangan yang

mengharuskan produksi padi terus meningkat diperlukan peran dari pemerintah daerah yaitu melalui dinas pertanian sebagai media untuk mengedukasi metode bercocok tanam yang bisa menghasilkan panen untuk memenuhi kebutuhan beras di Sumatera Barat.

Sementara Dinas Tata Ruang juga harus bisa menetapkan kawasan yang digunakan sebagai lahan pertanian sawah serta menetapkan kawasan mana yang bisa dialihfungsikan dan yang tidak bisa dialihfungsikan sehingga para investor tidak bisa sesuka hati untuk membeli tanah sawah dengan tujuan untuk dialihfungsikan. Selain itu perlu juga koordinasi dengan pejabat lainnya yang mengurus pengairan sehingga diketahui lahan yang memiliki tingkat pengairan yang baik sehingga bisa dinilai luas lahannya. Dengan dilakukan langkah seperti ini tidak akan terjadi lagi pengurangan luas panen, dan ketahanan pangan padi di daerah akan terjamin.

Luas panen yang terus turun dalam tiga tahun terakhir (2017-2019) tentu saja membuat jumlah produksi padi juga ikut turun. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat (2019) dalam 6 tahun terakhir (2014-2019) kemampuan produksi beras Sumatera Barat tidak stabil dan mengalami penurunan drastis dari tahun pada tahun 2018. Dapat dilihat pada gambar di bawah tentang jumlah produksi padi di Sumater Barat dari tahun 2014-2019.



Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2020

Gambar 5. Produksi Padi di Sumatera Barat

Gambar 5. menerangkan siklus produksi padi di Sumater Barat dari tahun 2014 hingga 2019. Produksi padi mengalami penurunan drastis dari tahun 2017 sebanyak 2.824.509 ton menjadi 1.483.076 ton pada tahun 2018. Penurunan ini dinilai sangat signifikan karena banyaknya pembangunan infrastruktur, jalan, perumahan, pengalihan lahan, lahan tidak produktif, dan nilai tukar padi yang rendah. Jumlah penduduk Sumatera Barat saat ini sebanyak 5.44 juta jiwa dan terus meningkat sebesar 1.1% atau 59.463 jiwa setiap tahunnya (BPS, 2019). Tentu saja dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahunnya maka semakin tinggi permintaan terhadap kebutuhan pangan padi, dengan nilai produksi 1.4 juta ton saat ini dinilai memang cukup untuk kebutuhan pokok pangan penduduk Sumatera Barat (Dinas Pangan Sumatera Barat, 2020). Akan tetapi jika dinilai dari sistem ketahanan pangan berkelanjutan, hal ini dinilai berbahaya karena semakin lama kebutuhan terhadap pangan padi akan semakin meningkat, sementara jumlah produksi terhadap padi terus menurun setiap tahunnya.

Indikator ketahanan pangan berkelanjutan dapat terjaga apabila unsur produksi

tidak turun, pada pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa provinsi Sumatera Barat tidak bisa menerapkan konsep ketahanan pangan yang berkelanjutan dikarenakan lahan sawah yang ada terus berkurang setiap tahunnya karena alih fungsi lahan, infrastruktur, peralihan lahan kepada perkebunan, pembuatan jalan, perumahan dan fasilitas publik lainnya, lahan yang terus berkurang setiap tahunnya tentu saja membuat jumlah produksi padi juga ikut turun sedangkan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan pangan terus meningkat setiap tahunnya.

Perhatian pemerintah terhadap aktifitas alih fungsi lahan masih pada tahap aspek pengendalian dan dampaknya bagi produksi pertanian pangan yang dihasilkan, pemerintah seharusnya memberikan bantuan kepada petani seperti memberikan kesempatan membuka lahan baru, subsidi pertanian dan kebutuhan alat pertanian. Demi mempertahankan ketahanan pangan yang berkelanjutan pada tingkat nasional ataupun daerah pemerintah seharusnya mengeluarkan kebijakan khusus untuk lebih memperhatikan serta memberikan penguatan dalam bentuk Pergub atau perwali/perbup dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Peraturan Daerah perlindungan lahan sawah yang berkelanjutan sangat berperan penting dalam upaya mengendalikan kegiatan alih fungsi lahan pertanian khususnya lahan sawah. Adanya peraturan yang konkret, komprehensif dan sistematis dapat mendorong penyelenggaraan pembangunan pertanian pangan berkelanjutan. Ketahanan pangan pada daerah atau nasional menandakan bahwa adanya ketersediaan lahan yang cukup agar sektor pertanian dapat dikembangkan secara maksimal dan menghasilkan pangan yang berkualitas serta memiliki daya saing. Ditambah lagi dengan penguatan kolaborasi lintas sektor antar pemerintah, petani, masyarakat, komunitas, pemilik modal dan swasta lainnya dapat menguatkan ketahanan pangan lokal, daerah serta nasional.

KESIMPULAN

Alih fungsi lahan sawah di Provinsi Sumatera Barat memiliki dampak negatif terhadap ketahanan pangan yang berkelanjutan. Maraknya pembangunan infrastruktur, jalan, perumahan, sarana umum dan alih fungsi lahan sawah menjadi perkebunan membuat kerentanan dalam ketahanan pangan berkelanjutan di Sumatera Barat. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian menyebabkan luas lahan sawah terus berkurang dan menjadikan luas panen juga berkurang, lebih lanjut efek dari hal tersebut berdampak pada jumlah produksi padi yang terus turun setiap tahunnya sedangkan pertumbuhan penduduk terus meningkat dan juga kebutuhan terhadap pangan juga meningkat.

Alih fungsi lahan sawah setiap tahunnya tidak dapat dikendalikan dengan baik sehingga mengancam ketahanan pangan masyarakat, ketahanan pangan dapat tetap terjaga apabila ketersediaan pangan dapat terpenuhi. Hal ini bisa dicapai dengan cara mempertahankan dan menambah luas lahan sawah, meningkatkan produktifitas padi dan mengontrol konsumsi pangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, F., Mulyo, J. H., Masyhuri, & Subejo. (2019). Ketahanan Pangan Rumah Tangga Peternak Sapi Potong Rakyat Pada Empat Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 25(2), 151–177. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22146/jkn.45620>

- Aisyah, I. N. T., Purnomo, E. P., & Kasiwi, A. N. (2020). Analisis Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Bantul. *Ijd-Demos*, 2(2), 151–162. <https://doi.org/10.37950/ijd.v2i2.40>
- Ambarita, A. (2017). Sistem Informasi Geografis Potensi Tanaman Pangan (Studi Kasus : Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara). *Indonesia Journal on Networking and Security*, 6(1), 2302–5700.
- Aninda, A. R., & Rijanta, R. (2017). Kajian Pemanfaatan Sumberdaya Pangan Lokal Terhadap Ketahanan Pangan Rumah Tangga Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Bumi Indonesia*, 3(1), 78–88.
- Arifin, A. (2019). Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan di Kota Parepare. *Jurnal Pangadereng*, 2(12), 162–174.
- Armawi, A. (2016). Memaknai Kembali Ketahanan Pangan. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 14(1), 77–87. <https://doi.org/10.22146/jkn.22183>
- Bayu, D. J. (2020). *Lahan Pertanian RI berkurang 120 ribu Ha Setiap Tahun*. Katadata.Com2. <https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/5e9a4215415ce/moeldoko-sebut-lahan-pertanian-ri-susut-120-ribu-hektare-tiap-tahun#:~:text=Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia,pertanian semakin menyusut setiap tahunnya.&text=Moeldoko mengatakan%2C penyusutan>
- Budhi, M. K., Yasa, I. N., & Darma, K. (2017). Impacts Of Development Of Population And Conversion Of Agricultural Land On Food Security (Rice) In Bali , Indonesia. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, V(12), 634–643.
- Burchi, F., & De Muro, P. (2016). From food availability to nutritional capabilities: Advancing food security analysis. *Food Policy Elsevier*, 60, 10–19. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2015.03.008>
- Chawarika, A. (2016). Food Security and the Developing World-Emerging Issues. *Munich Personal RePEc Archive*, 6461, 1–17. <https://doi.org/10.1111/j.1574-0862.2010.00507.x/abstract>
- Fairhurst, T., & Dobermann, A. (2002). Rice in the Global Food Supply. *Better Corps International*, 16(5), 3–6.
- Fattah, A. N., & Purnomo, E. P. (2018). Analisis Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non – Pertanian Di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2016 (Studi Kasus Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten). *Jispo (Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik)*, 8(1), 113–140.
- Hakim, M. . (2014). *Memperkuat Ketahanan Pangan Demi Masa Depan Indonesia 2015-2-25*. Rumah Buku.
- Haryanto, I. (2018). Analisis Ketahanan Pangan Rumah Tangga Pertanian. *Jurnal Bumi Indonesia*, 4(1), 90–102.
- Hui, L. (2013). The evaluation index system establishment of the food security in developing country. *Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology*, 5(17), 4284–4290. <https://doi.org/10.19026/rjaset.5.4418>
- Janti, gesthi ika, Martono, E., & Subejo. (2016). Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Bantul, DI Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 22(1), 1–21.
- Jaya, P. H. I. (2018). Nasib Petani Dan Ketahanan Pangan Wilayah (Studi Tentang Kebijakan Pemerintah Dan Respons Masyarakat Desa Mulyodadi, Bantul Ketika Harga Komoditas Pertanian Naik). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 24(1), 77. <https://doi.org/10.22146/jkn.32923>
- Karini, D. M. (2013). Dampak Alih Fungsi Lahan Persawahan Terhadap Produksi Beras

- Dalam Rangka Ketahanan Pangan. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 19(1), 12–18.
- Kastanja, A. Y., Patty, Z., & Dilago, Z. (2019). Pemanfaatan Pekarangan Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Masyarakat Desa Kali Upa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 173–181.
- Nuryartono, N., Togato, A., Yusdiyanto, S., Pasaribu, S. H., & Anggraenie, T. (2017). Land conversion and economic development in Jawa Barat Province : Trade off or Synergy ? *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1–10. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/755/1/011001>
- Panuju, D. R., Mizuno, K., & Trisasongko, B. H. (2013). The dynamics of rice production in Indonesia 1961–2009. *Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences*, 12(1), 27–37. <https://doi.org/10.1016/j.jssas.2012.05.002>
- Prasada, I. M. Y., & Rosa, T. A. (2018). Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Terhadap Ketahanan Pangan Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 14(3), 210. <https://doi.org/10.20956/jsep.v14i3.4805>
- Rimadianti, D. M., & Daryanto, A. (2016). Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Gizi Dan Pangan*, 11(1), 75–82. <https://doi.org/10.25182/jgp.2016.11.1>
- Sinaga, S. R. P., Lubis, S. N., & Salmiah. (2014). Analisis Forecasting Ketersediaan Pangan 2015 Dalam Rangka Pemantapan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara. *Journal on Social Economic of Agriculture Ang Agribusiness*, 2(4), 1–13. <http://jurnal.usu.ac.id/index.php/ceress/article/view/7859>
- Sudarwani, M. M., & Ekaputra, Y. D. (2014). Konservasi Lahan Kritis Untuk Pertanian Produktif Dalam Pencapaian ketahanan Pangan di Kecamatan GunungPati Semarang. *Prosiding Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Fakultas Teknik*, 2011, 17–22. <http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/133823>
- Sugiantoro, D., Palolong, A., & Nursalam. (2015). Aplikasi Sistem Informasi Geografi Untuk Identifikasi Lahan Pangan Berkelanjutan. *Agrotekbis*, 3(6), 662–668.
- Van Oort, P. A. J., Saito, K., Tanaka, A., Amovin-Assagba, E., Van Bussel, L. G. J., Van Wart, J., De Groot, H., Van Ittersum, M. K., Cassman, K. G., & Wopereis, M. C. S. (2015). Assessment of rice self-sufficiency in 2025 in eight African countries. *Global Food Security*, 5, 39–49. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2015.01.002>
- Wardani, C., Jamhari, J., Hardyastuti, S., & Suryantini, A. (2019). Kinerja Ketahanan Beras Di Indonesia: Komparasi Jawa Dan Luar Jawa Periode 2005-2017. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 25(1), 107. <https://doi.org/10.22146/jkn.41770>
- Waryanta. (2016). Reforma Agraria: Momentum Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Kecil dalam Mendukung Ketahanan Pangan. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 2(2), 179. <https://doi.org/10.31292/jb.v2i2.69>
- Wu, J., Zhang, J., Wang, S., & Kong, F. (2016). Assessment of food security in China: A new perspective based on production-consumption coordination. *Sustainability (Switzerland)*, 8(3), 1–14. <https://doi.org/10.3390/su8030183>
- Ye, L., Tang, H., Wu, W., Yang, P., Nelson, G. C., Mason-D’Croz, D., & Palazzo, A. (2014). Chinese food security and climate change: Agriculture futures. *Economics*, 8(1), 1–57. <https://doi.org/10.5018/economics-ejournal.ja.2014-1>
- Zou, J., & Guo, S. (2015). China’s Food Security Evaluation Based on Factor Analysis. *American Journal of Industrial and Business Management*, 05(06), 447–456. <https://doi.org/10.4236/ajibm.2015.56044>